



PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

CASCADING



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

CASCADING KINERJA HASIL PENYELARASAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastrukturnya wilayah dan yang andal.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	Meningkatnya capaian akuntabilitas DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai	B (66,5)	B(68)	B(69,5)	BB(71)	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan DPUPR	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .	Persentase Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen Perencanaan, Pen ganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	9	9	9	9
	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,34	85,00	85,34	86	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan layanan publik DPUPR	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR	Nilai	81	81,5	82	82,5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .	Persentase Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Terbnyarnya gaji dan Tunjangan ASN + PPPK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN+PPPK	Orang	117	117	117	117
																																		Dokumen	12	12	12	12
																																		Dokumen	1	1	1	1
																																		Paket	12	12	12	12
																																		Paket	10	5	5	5
																																		Laporan	12	12	12	12
																																		Laporan	12	12	12	12
																																		Unit	16	16	16	16
																																		Unit	1	1	1	1
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kenahalan Konstruksi	Persentase	92,50	92,00	91,50	91,00	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	80	80,25	80,50	80,75	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Penyelenggaraan an Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	80	80,25	80,50	80,75	Terlaksananya sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	750,92	753,27	755,61	757,96	Terlaksananya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advia dan layanan teknis, kajian teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian.	Dokumen	6	6	6	6

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
																															Tersedianya leger jalan	Pengelolaan leger jalan	Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	Dokumen	1	1	1	1
																															Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan	Survey kondisi jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jumlah jembatan yang disurvei kondisinya	Km	939	938,65	938,65	938,65
																															Terekonstruksinya jalan	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Km	16,6	18,212	18,212	18,212
																															Tertaksananya rehabilitasi jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	1,99	0,456	0,456	0,456
																															Terpeliharanya jalan secara berkala	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Km	5,16	14,489	14,489	14,489
									Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persentase	99,83	99,83	99,83	99,83	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan	Penyelenggaraan an Jalan	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persentase	99,83	99,83	99,83	99,83	Tersedianya sarana dan prasarana jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota	Jumlah jembatan dalam kondisi mantap	Unit	582	582	582	582	Terbengunnya jembatan	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Unit	-	-	-	-
																															Tergantuknya jembatan yang sudah rusak	Penggantian jembatan	Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian	Unit	5	-	-	-
																															bertambahnya lebar jembatan	Pelebaran jembatan	Jumlah jembatan yang mengalami pelebaran	Unit				
																															Terpeliharanya jembatan secara berkala	Pemeliharaan berkala jembatan	Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala	Unit	2	3	3	3
																															Terwujudnya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Dokumen	14	15	15	15
								Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistim Drainase	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai	Persentase	3,36	3,36	3,36	3,36	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistim Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistim Drainase	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai	Persentase	3,36	3,36	3,36	3,36	Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab / kota	Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase/ saluran pembuangan air	Km	31,54	31,54	31,54	31,54	Tersusunnya DED drainase perkotaan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistim drainase perkotaan	Jumlah dokumen DED yang disusun	Dokumen	-	-	-	-
																															Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan	Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan	Dokumen	-	-	-	-
																															Tersedianya saluran drainase perkotaan yang sesuai dengan standar	Peningkatan saluran drainase perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	Km	-	-	-	-
																															Tersejahteranya saluran drainase perkotaan	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	Km	131	0,111	0,111	0,111
																															Terbangunnya sistim drainase lingkungan	Pembangunan sistim drainase lingkungan	Panjang saluran drainase yang dibangun	Km	-	-	-	-
																															Meningkatnya kualitas saluran drainase lingkungan	Peningkatan saluran drainase lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang ditingkatkan	Km	-	-	-	-
																															Tersusunnya DED drainase lingkungan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistim drainase lingkungan	Jumlah dokumen DED yang disusun	Dokumen	-	-	-	-
								Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase	76	76	78	80	Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase	76	76	78	80	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota	Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kelompok 10 P3A/GP3A	10	10	10	10	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Pembinaan dan pemberdayaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan sda kewenangan kab / kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan SDA	Kelompok 10 P3A/GP3A	10	10	10	10

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
																							Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota	Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	2891,3	4396	6315	9634	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Dokumen teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi	Dokumen	3	4	2	6
																														Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan jaringan irigasi yang permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	m	1367	4236	1063	2896	
																														Tersedianya sarana dan prasarana irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	m	1524	160	4070	4817	
																														Terwujudnya pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	m	-	-	1182	1927	
																														Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi	Operasional unit pengelola irigasi	Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana	Paket	1	1	1	1	
								Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis	Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis	Persentase	8,16	11,56	14,96	18,36	Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis	Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis	Persentase	8,16	11,56	14,96	18,36	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	Unit	5	5	5	5	Meningkatnya Penerbitan Persebaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persebaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Unit	50	50	50	50
																														Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3	
																														Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Daerah Kabupaten/Kota	Pengubahsuaian Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dihabiskan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dihabiskan	Unit	4	4	4	4	
																														Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab / kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Unit	5	5	5	5	
								Terselenggaranya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Persentase	20	-	60	80	Terselenggaranya Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Persentase	20	-	60	80	Terselenggaranya pelatihan tenaga trampil konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil bersertifikat	Orang	20	-	60	80	Meningkatnya tenaga kerja yang bersertifikat trampil	Pelatihan tenaga kerja yang bersertifikat trampil	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat trampil	Orang	20	-	60	80

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
								Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang	Persentase	20	40	60	80	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang	Persentase	20	40	60	80	Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Dokumen	5	1	4	3	Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya	Dokumen	5	1	4	3
																															Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Ruang yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1
																							Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota	Dokumen	2	2	2	2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Dokumen	2	2	2	2
																							Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Dokumen	2	3	2	2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	3	2	2



Banjarnegara, 22 Januari 2024

KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF WINARSONO, ST.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710507 199803 1 007